



LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2024



**KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR**

**BAB
I****PENDAHULUAN****1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD****a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawasan, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, hibah, investasi, pinjaman, serta pemerintah pusat.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut atas sumber daya yang dipercayakan, dengan :

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas;
- 2) menyediakan informasi mengenai hasil operasional atas penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 03)
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 9);

- r. Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 55);
- s. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 51);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 5.1. Rincian penjelasan masing-masing pos laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Rincian penjelasan masing-masing pos Laporan Operasional
 - 5.2.1. Pendapatan Laporan Operasional
 - 5.2.2. Beban
 - 5.2.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4. Pos Luar Biasa
- 5.3. Rincian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1. Ekuitas Awal
 - 5.3.2. Surplus (Defisit) – LO
 - 5.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar
 - 5.3.4. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan
 - 5.3.5. Ekuitas Akhir
- 5.4. Rincian penjelasan masing-masing pos Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban
 - 5.4.3. Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Dasar Hukum Pendirian Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- 6.2. Organisasi Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- 6.3. Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- 6.4. Sumber Daya Manusia
- 6.5. Sarana Dan Prasarana Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

BAB VII PENUTUP

**BAB
II****EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1 Ekonomi Makro**

Asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2024 antara lain adalah:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2024 mencerminkan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mencapai 5,12%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,85%. Pertumbuhan ini didorong oleh :

- Sektor Pertanian : Kontribusi utama dari subsektor tanaman pangan, terutama produksi padi dan jagung, yang meningkat seiring dengan kebijakan modernisasi pertanian.
- Sektor Perdagangan : Aktivitas perdagangan domestik yang meningkat, didukung oleh pasar lokal dan distribusi logistik yang lebih baik.
- Sektor Industri : Pertumbuhan sektor industri pengolahan, khususnya industri makanan dan minuman.

b. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Banjar tahun 2024 tercatat sebesar **1,57%** secara year-on-year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2023 yang sebesar **2,61%**, menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian harga di tengah fluktuasi ekonomi global. Inflasi dipengaruhi oleh:

- Komoditas Penyumbang Inflasi : Beras, ikan gabus, dan telur ayam ras.
- Komoditas Penahan Inflasi : Daging ayam ras, cabai merah, dan mangga.
- Kebijakan Pengendalian Harga : Pemerintah daerah melalui operasi pasar dan subsidi untuk komoditas strategis.

c. Nilai kurs

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Kabupaten Banjar mengikuti tren nasional, dengan rata-rata kurs sepanjang tahun 2024 berada pada Rp. 15.250,00 / USD. Fluktuasi nilai kurs memberikan dampak pada biaya

impor bahan baku industri dan komoditas tertentu, namun langkah diversifikasi ekonomi mampu memitigasi dampak tersebut..

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar diselaraskan dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 serta RKPD Tahun 2024, sebagai berikut:

Arah Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Arah Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja diarahkan pada penggunaan dana yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dan sebaik mungkin agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan :

- a. Keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan
- b. Efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil dari program dan kegiatan
- c. Memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis
- d. Dana yang tersedia dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kejahteraan masyarakat.
- e. Indikator yang jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD TA 2024

Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam tahun 2024 melaksanakan Kegiatan dan sub kegiatan dengan target dan capaian sebagai berikut:

Nama Kegiatan, Sub Kegiatan, Masukan, Keluaran, Hasil	Target	Capaian
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan RPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.871.100,00	Rp. 3.658.100,00
Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
Hasil : Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.286.062.172,00	Rp. 3.748.659.665,00
Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
Hasil : Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.000.000,00	Rp. 21.000.000,00
Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%
Hasil : Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp. 800.000,00	Rp. 790.000,00
Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%
Hasil : Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.648.000,00	Rp. 195.977.726,00
Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
Hasil : Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.976.000,00	Rp. 29.100.000,00
Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.232.320,00	Rp. 173.477.141,00
Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.857.800,00	Rp. 84.229.150,00
Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.594.000,00	Rp. 60.510.000,00
Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.364.000,00	Rp. 62.102.800,00
Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.468.640.542,00	Rp. 1.428.226.823,00
Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
12. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Sub Kegiatan	: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.296.000,00	Rp. 23.189.000,00
Keluaran	: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
13. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.287.000,00	Rp. 4.120.000,00
Keluaran	: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
14. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 182.320.000,00	Rp. 177.957.000,00
Keluaran	: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67
15. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.942.000,00	Rp. 17.480.000,00
Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%
Hasil	: Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96,67

**BAB
III**
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.658.100,00 atau 94,50% dari anggarannya sebesar Rp. 3.871.100,00.

Realisasi keuangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	1.534.800,00
▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	320.000,00
▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	406.100,00
▪ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.	441.000,00
▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	475.200,00
▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	481.000,00
Jumlah	Rp.	3.658.100,00

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.748.659.665,00 atau 87,46% dari anggarannya sebesar Rp. 4.286.062.172,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.699.859.665,00
▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	48.440.000,00

▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	360.000,00
Jumlah	Rp.	3.748.659.665,00

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 21.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp. 21.000.000,00.

Realisasi Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	21.000.000,00
Jumlah	Rp.	21.000.000,00

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp. 790.000,00 atau 98,75% dari anggarannya sebesar Rp. 800.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	790.000,00
Jumlah	Rp.	790.000,00

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 195.977.726,00 atau 97,67% dari anggarannya sebesar Rp. 200.648.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	1.042.500,00
▪ Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Rp.	480.000,00
▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	1.646.000,00

▪ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	23.412.500,00
▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	4.278.700,00
▪ Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.	1.875.000,00
▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	156.043.026,00
▪ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.	7.200.000,00
Jumlah	Rp.	195.977.726,00

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29.100.000,00 atau 97,08% dari anggarannya sebesar Rp. 29.976.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersebut merupakan realisasi belanja modal yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	29.100.000,00
Jumlah	Rp.	29.100.000,00

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 173.477.141,00 atau 96,25% dari anggarannya sebesar Rp. 180.232.320,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	2.000.000,00
▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	25.465.005,00
▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	146.012.136,00
Jumlah	Rp.	173.477.141,00

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 84.229.150,00 atau 93,74% dari anggarannya sebesar Rp. 89.857.800,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	57.536.650,00
▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	12.069.500,00
▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	14.623.000,00
Jumlah	Rp.	84.229.150,00

9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 60.510.000,00 atau 93,68% dari anggarannya sebesar Rp. 64.594.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.	60.510.000,00
Jumlah	Rp.	60.510.000,00

10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 62.102.800,00 atau 98,01% dari anggarannya sebesar Rp. 63.364.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	8.990.000,00
▪ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	53.112.800,00
Jumlah	Rp.	62.102.800,00

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.428.226.823,00 atau 97,25% dari anggarannya sebesar Rp. 1.468.640.542,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 1.428.226.823,00
Jumlah	Rp. 1.428.226.823,00

12. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 23.189.000,00 atau 99,54% dari anggarannya sebesar Rp. 23.296.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 19.992.000,00
▪ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.197.000,00
Jumlah	Rp. 23.189.000,00

13. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.120.000,00 atau 96,10% dari anggarannya sebesar Rp. 4.287.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp.	4.120.000,00
Jumlah	Rp.	4.120.000,00

14. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 177.957.000,00 atau 97,61% dari anggarannya sebesar Rp. 182.320.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.	74.217.000,00
▪ Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Rp.	78.900.000,00
▪ Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.	24.840.000,00
Jumlah	Rp.	177.957.000,00

15. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.480.000,00 atau 97,43% dari anggarannya sebesar Rp. 17.942.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	2.105.000,00
▪ Fasilitas Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.	3.655.000,00

▪ Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	3.090.000,00
▪ Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	3.790.000,00
▪ Fasilitas Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp.	1.960.000,00
▪ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp.	3.270.000,00
Jumlah	Rp.	17.480.000,00

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum pencapaian target keuangan dan kinerja APBD sudah baik, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar antara lain :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia masih dirasa kurang, sehingga beberapa orang pegawai memegang tugas ganda dalam rangka pemenuhan tugas pokok sehari-hari, dengan harapan ada penambahan PNS terutama staf untuk setiap bagian dan seksi-seksi.
2. Tingkat pendidikan (SDM) yang ada sudah sangat memadai, namun masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD di antara pelaku yang terkait kegiatan, pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD.

**BAB
IV****KEBIJAKAN AKUNTANSI****4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Pemerintah Kecamatan Gambut adalah unit pengguna anggaran dan unit pengguna barang yang merupakan **entitas akuntansi** keuangan daerah. Sebagai entitas akuntansi, Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada SKPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut adalah :

- Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, dalam Laporan Operasional.
- Basis Akrual juga untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BPKPAD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan LO dan beban diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau terjadinya transaksi pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut sebagai bagian dari LKPD Kabupaten Banjar menggunakan basis pengukurannya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta Lampirannya. Kebijakan basis pengukuran di atas sebagai dasar penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah.

a. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- Pengukuran Pendapatan

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening entitas akuntansi atau saat diterima oleh Bendahara Penerima.
2. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

- Pengukuran Belanja

1. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

b. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Operasional

- Pengukuran Pendapatan LO

1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

- Pengukuran Beban

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Basis Pengukuran Pos-pos Neraca

A. ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah saldo kas pertanggal 31 Desember tahun pelaporan, Kas mencakup saldo simpanan di bank, termasuk saldo kas yang berada direkening titipan, Kas di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggung-jawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (yang belum disetor ke kas daerah).

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas di Bendahara dalam valuta asing dikonversi dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mempunyai jatuh tempo yang pendek misalnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya, yang siap dikonversikan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh setara kas adalah Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan.

2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi kepada entitas lain yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi .
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

penyisihan untuk piutang tidak tertagih ditentukan dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori Piutang	% penyisihan piutang
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Piutang Lainnya adalah hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menerima pembayaran dari entitas lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yaitu Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti dan Piutang Lainnya.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banjar dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan dan biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, dan biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. serta nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, yang memenuhi karakteristik dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek meliputi Deposito Jangka Pendek, Obligasi Jangka Pendek, dan Investasi Jangka Pendek Lainnya.

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau hanya ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dinilai berdasarkan harga perolehan ditentukan berdasarkan sertifikat/dokumen kepemilikan serta catatan-catatan yang diselenggarakan oleh SKPD

a) Tanah

Tanah diakui sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai

b) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran/kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi/pengolahan/pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui sebesar biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui sebesar biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dinyatakan dalam neraca dengan nilai perolehan. meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun, berdasarkan kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan.

g) **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara tahunan yaitu pada periode tahun saat perolehan aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing- masing kelompok aset tetap sesuai Perbup 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar.

7. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan belanja pada masa datang yang tidak cukup dibebankan dalam satu tahun anggaran, misalnya Dana Pilkada. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah, dan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Dengan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk serta dapat disimpan dalam bentuk deposito berisiko rendah.

8. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Contohnya adalah tagihan piutang penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR), kemitraan dengan pihak ketiga, dan tidak berwujud dan aset lain-lain

B. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Hutang jangka panjang merupakan hutang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan.

C. EKUITAS

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kecamatan Gambut yang menunjukkan hak Pemerintah Kecamatan Gambut terhadap aset yang dimiliki atau dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ke-tiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ke-tiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kecamatan Gambut, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Perubahan ekuitas berasal dari nilai ekuitas awal dikurangi atau ditambah surplus atau defisit dari laporan operasional kemudian dikurangi nilai koneksi ekuitas. Koneksi ekuitas merupakan koneksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP berbasis aktual untuk pertama kali. Koneksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koneksi pembukuan termasuk koneksi atau pencatatan aset.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam tahun 2024

mengikuti aturan tersebut. Dimana juga terjadi penyesuaian atas kodifikasi pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB
V**
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. RINCIAN PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komposisi Laporan Realisasi Anggaran TA. 2024 dibandingkan dengan TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/Turun
PENDAPATAN	0,00	0,00	0	0,00	0
BELANJA	6.636.890.934,00	6.030.477.405,00	90,86	6.407.828.686,00	(5,89)
TRANSFER	0,00	0,00	0	0,00	0
SURPLUS/DEFISIT	(6.636.890.934,00)	(6.030.477.405,00)	90,86	(6.407.828.686,00)	(5,89)
SILPA	(6.636.890.934,00)	(6.030.477.405,00)	90,86	(6.407.828.686,00)	(5,89)

Jumlah Realisasi Pendapatan TA. 2024 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 0,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 0,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 0,00.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2024 sebesar Rp. 6.030.477.405,00 terdiri dari Belanja sebesar Rp. 6.030.477.405,00 dan Transfer sebesar Rp. 0,00.

Jumlah Realisasi Surplus/Defisit dari realisasi APBD sebesar (Rp. 6.030.477.405,00) merupakan hasil perhitungan dari realisasi Pendapatan sebesar Rp. 0,00 dikurangi realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp. 6.030.477.405,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA. 2024 sebesar Rp. 0,00 merupakan hasil penjumlahan dari hasil Defisit APBD sebesar Rp. 0,00 ditambah jumlah Netto Pembiayaan sebesar Rp. 0,00.

5.1.1 BELANJA

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.636.890.934,00	6.030.477.405,00	6.407.828.686,00

Realisasi Belanja ini terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/Turun
Belanja Operasi	6.125.248.934,00	5.523.431.405,00	90,17	5.766.103.983,00	(4,21)
Belanja Modal	511.642.000,00	507.046.000,00	99,10	641.724.703,00	(20,99)
JUMLAH	6.636.890.934,00	6.030.477.405,00	90,86	6.407.828.686,00	(5,89)

5.1.1.1 Belanja Operasi**Anggaran 2024 (Rp)****Realisasi 2024 (Rp)****Realisasi 2023 (Rp)****6.125.248.934,00 5.523.431.405,00 5.766.103.983,00**

Belanja Operasi terdiri dari:

Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/Turun
Belanja Pegawai	4.316.982.172,00	3.779.579.665,00	87,55	3.308.407.569,00	14,24
Belanja Barang dan Jasa	1.808.266.762,00	1.743.851.740,00	96,44	2.457.696.414,00	(29,05)
Belanja Hibah	0,00	0,00	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0	0,00	0
JUMLAH	6.125.248.934,00	5.523.431.405,00	90,17	5.766.103.983,00	(4,21)

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	4.316.982.172,00	3.779.579.665,00	87,55	3.308.407.569,00	471.172.096,00	14,24

Merupakan belanja yang berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dengan rincian realisasi tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/Turun
Gaji dan Tunjangan ASN	2.655.644.404,00	2.183.356.865,00	82,22	1.888.025.818,00	295.331.047,00	15,64
Tambahan Penghasilan ASN	1.580.937.768,00	1.516.502.800,00	95,92	1.333.741.751,00	182.761.049,00	13,70
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.400.000,00	79.720.000,00	99,15	86.640.000,00	(6.920.000,00)	(7,99)
JUMLAH	4.316.982.172,00	3.779.579.665,00	87,55	3.308.407.569,00	471.172.096,00	14,24

b. Belanja Barang/jasa

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa	1.808.266.762,00	1.743.851.740,00	96,44	2.457.696.414,00	(713.844.674,00)	(29,05)

Merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan realisasi tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang	574.809.242,00	546.374.421,00	95,05	347.500.900,00	198.873.521,00	57,23

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang Pakai Habis	574.809.242,00	546.374.421,00	95,05	344.700.900,00	201.673.521,00	58,51
Belanja Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	0	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100)
JUMLAH	574.809.242,00	546.374.421,00	95,05	347.500.900,00	198.873.521,00	57,23

Belanja Barang Tak Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu pada Tahun 2023 merupakan komponen rekening Belanja Barang Pakai Habis.

2) Belanja Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa	870.461.720,00	852.400.483,00	97,93	1.800.488.508,00	(948.088.025,00)	(52,66)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa Kantor	827.539.720,00	811.496.347,00	98,06	1.752.081.668,00	(940.585.321,00)	(53,68)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.695.000,00	14.712.136,00	88,12	14.216.840,00	495.296,00	3,48
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.227.000,00	6.192.000,00	99,44	3.220.000,00	2.972.000,00	92,30
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100)
Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	100	26.970.000,00	(6.970.000,00)	(25,84)
JUMLAH	870.461.720,00	852.400.483,00	97,93	1.800.488.508,00	(948.088.025,00)	52,66

3) Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pemeliharaan	125.495.800,00	108.440.900,00	86,41	90.088.400,00	18.352.500,00	20,37

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.698.000,00	77.019.900,00	82,20	68.518.400,00	8.501.500,00	12,41
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.797.800,00	31.421.000,00	98,82	21.570.000,00	9.851.000,00	45,67
JUMLAH	125.495.800,00	108.440.900,00	86,41	90.088.400,00	18.352.500,00	20,37

4) Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas	237.500.000,00	236.635.936,00	99,64	219.618.606,00	17.017.330,00	7,75

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	237.500.000,00	236.635.936,00	99,64	219.618.606,00	17.017.330,00	7,75
JUMLAH	237.500.000,00	236.635.936,00	99,64	219.618.606,00	17.017.330,00	7,75

5.1.1.2 Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	511.642.000,00	507.046.000,00	641.724.703,00

Belanja Modal terdiri dari:

Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Peralatan dan Mesin	130.962.000,00	126.366.000,00	99,10	224.664.703,00	(43,75)
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	70.155.000,00	(100)
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	380.680.000,00	380.680.000,00	100	346.905.000,00	9,74
JUMLAH	511.642.000,00	507.046.000,00	99,10	641.724.703,00	(20,99)

Belanja Modal merupakan belanja pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset

Tetap dan Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud dengan Realisasi pada tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut :

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.962.000,00	126.366.000,00	96,49	224.664.703,00	(98.298.703,00)	(43,75)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun Anggaran 2024 dan 2024 masing-masing sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Angkutan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Angkutan	26.500.000,00	23.150.000,00	87,36	0,00	23.150.000,00	100

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Alat Angkutan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	26.500.000,00	23.150.000,00	87,36	0,00	23.150.000,00	100
JUMLAH	26.500.000,00	23.150.000,00	87,36	0,00	23.150.000,00	100

2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	55.916.000,00	55.210.000,00	98,74	73.253.500,00	(18.043.500,00)	(24,63)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Kantor	6.228.000,00	6.000.000,00	96,34	29.155.000,00	(23.155.000,00)	(79,42)

Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.660.000,00	39.310.000,00	99,12	20.500.000,00	18.810.000,00	91,76
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	10.028.000,00	9.900.000,00	98,72	23.598.500,00	(13.698.500,00)	(58,05)
JUMLAH	55.916.000,00	55.210.000,00	98,74	73.253.500,00	(18.043.500,00)	(23,63)

3) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	(15.800.000,00)	(100)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	100	15.800.000,00	(15.800.000,00)	(100)
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	(15.800.000,00)	(100)

4) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	26.061.203,00	(26.061.203,00)	(100)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	26.061.203,00	(26.061.203,00)	(100)
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	26.061.203,00	(26.061.203,00)	(100)

5) Belanja Modal Komputer

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Komputer	48.546.000,00	48.006.000,00	98,89	109.550.000,00	(26.061.203,00)	(56,18)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Komputer Unit	34.650.000,00	34.110.000,00	98,44	67.600.000,00	(33.490.000,00)	(49,54)
Belanja Modal Peralatan Komputer	13.896.000,00	13.896.000,00	100	41.950.000,00	(28.054.000,00)	(66,87)
JUMLAH	48.546.000,00	48.006.000,00	98,89	109.550.000,00	(26.061.203,00)	(56,18)

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut :

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	70.155.000,00	(70.155.000,00)	(100)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0	70.155.000,00	(70.155.000,00)	(100)
JUMLAH	0,00	0,00	0	70.155.000,00	(70.155.000,00)	(100)

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut :

Uraian	TA. 2024		%	TA. 2023	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	380.680.000,00	380.680.000,00	100	346.905.000,00	33.775.000,00	9,74

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	315.180.000,00	315.180.000,00	100	346.905.000,00	(31.725.000,00)	(9,15)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	346.905.000,00	(146.905.000,00)	(43,35)
Belanja Modal Jembatan	115.180.000,00	115.180.000,00	100	0	115.180.000,00	100
JUMLAH	315.180.000,00	315.180.000,00	100	346.905.000,00	(31.725.000,00)	(9,15)

2) Belanja Modal Bangunan Air

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Bangunan Air	65.500.000,00	65.500.000,00	100	0,00	65.500.000,00	100

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	65.500.000,00	65.500.000,00	100	0,00	65.500.000,00	100
JUMLAH	65.500.000,00	65.500.000,00	100	0,00	65.500.000,00	100

5.1.2 SiLPA

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
0,00	0,00	0,00

SiLPA pada tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 merupakan surplus defisit, Pembiayaan Netto, dan SiLPA tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja + Transfer	6.636.890.934,00	6.030.477.405,00	90,86	6.407.828.686,00	(377.351.281,00)	(5,89)
Surplus (Defisit)	(6.636.890.934,00)	(6.030.477.405,00)	(90,86)	(6.407.828.686,00)	(377.351.281,00)	(5,89)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Jumlah Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh Kegiatan Operasional keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) Non-Operasional.

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban	6.185.453.104,00	6.388.810.348,00	(203.357.244,00)	(3,18)
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(6.185.453.104,00)	(6.388.810.348,00)	203.357.244,00	(3,18)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0
Surplus/Defisit LO	(6.185.453.104,00)	(6.388.810.348,00)	203.357.244,00	(3,18)

5.2.1 PENDAPATAN – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>0,00</u>

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kecamatan Gambut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah - LO, Pendapatan Transfer - LO, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.2.2 BEBAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>6.185.453.104,00</u>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Realisasi beban tahun 2024 sebesar

Rp. 6.185.453.104,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 6.388.810.348,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Pegawai	3.779.579.665,00	3.308.407.569,00	471.172.096,00
2	Beban Barang dan Jasa	1.747.349.599,00	2.482.881.339,00	(735.531.740,00)
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	657.122.840,00	597.521.440,00	59.601.400,00
4	Beban Lain-Lain	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
	Jumlah	6.185.453.104,00	6.388.810.348,00	(203.357.244,00)

Penjelasan masing-masing Beban adalah sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.779.579.665,00	3.308.407.569,00

Beban Pegawai untuk periode tahun 2024 sebesar Rp. 3.779.579.665,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 3.308.407.569,00 dengan rincian beban sebagai berikut:

No	Beban Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.183.356.865,00	1.888.025.818,00	295.331.047,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.516.502.800,00	1.333.741.751,00	182.761.049,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.720.000,00	86.640.000,00	(6.920.000,00)
	Jumlah	3.779.579.665,00	3.308.407.569,00	471.172.096,00

5.2.2.2. Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.747.349.599,00	2.479.023.856,00

Beban Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp. 1.747.349.599,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 2.479.023.856,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Barang	535.800.921,00	369.943.103,00	165.857.818,00
2	Beban Jasa	852.631.842,00	1.799.373.747,00	(946.741.905,00)
3	Beban Pemeliharaan	122.280.900,00	93.945.883,00	28.335.017,00
4	Beban Perjalanan Dinas	236.635.936,00	219.618.606,00	17.017.330,00
	Jumlah	1.747.349.599,00	2.482.881.339,00	(735.531.740,00)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan terkait beban barang dan jasa, yaitu:

a. Beban Barang

Beban Barang tahun 2024 sebesar Rp. 535.800.921,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 369.943.103,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Barang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	535.800.921,00	369.943.103,00	165.857.818,00
	Jumlah	535.800.921,00	369.943.103,00	165.857.818,00

b. Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2024 sebesar Rp. 852.631.842,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 1.799.373.747,00 dengan Rincian Sebagai berikut:

No	Beban Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	811.727.706,00	1.750.966.907,00	(939.239.201,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	14.712.136,00	14.216.840,00	495.296,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.192.000,00	3.220.000,00	2.972.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)
5	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	26.970.000,00	(6.970.000,00)
	Jumlah	852.631.842,00	1.799.373.747,00	(946.741.905,00)

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp. 122.280.900,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 93.945.883,00 dengan Rincian Sebagai berikut:

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71.919.900,00	72.375.883,00	(455.983,00)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.421.000,00	21.570.000,00	9.851.000,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.940.000,00	0,00	18.940.000,00
	Jumlah	122.280.900,00	93.945.883,00	28.335.017,00

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp. 236.635.936,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 219.618.606,00 dengan Rincian Sebagai berikut:

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	236.635.936,00	219.618.606,00	17.017.330,00
	Jumlah	236.635.936,00	219.618.606,00	17.017.330,00

5.2.2.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
657.122.840,00	597.521.440,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp. 657.122.840,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 597.521.440,00 yang terdiri atas :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	143.731.700,00	127.453.175,00	16.278.525,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	264.042.874,00	261.704.374,00	2.338.500,00
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	249.348.266,00	208.363.891,00	40.984.375,00
Jumlah		657.122.840,00	597.521.440,00	59.601.400,00

5.2.2.4. Beban Lain-lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.401.000,00	0,00

Beban Lain-lain merupakan beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang. Dalam hal ini beban lain-lain tahun 2024 sebesar Rp. 1.401.000,00 digunakan untuk mencatat penurunan nilai investasi sebesar Rp. 0,00 dan mencatat nilai aset yang dipindahkan ke Ekstrakomptabel sebesar Rp. 1.401.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Lain-lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Aset Ekstrakomptable	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
Jumlah		1.401.000,00	0,00	1.401.000,00

Adapun beban lain-lain yang merupakan Aset Ekstrakomptable tahun 2024 sebesar Rp. 1.401.000,00 dan tahun 2023 Sebesar Rp. 0,00.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Lain-lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
5	Defisit penghapusan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Defisit non operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00	0,00

5.2.4. POS LUAR BIASA	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pos Luar Biasa merupakan Beban Tak Terduga yang sifatnya bukan merupakan operasi biasa, tidak sering terjadi dan berada di luar kendali entitas. Realisasi beban tak terduga untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00.

5.2.5. SURPLUS/DEFISIT – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>(6.185.453.104,00)</u>	<u>(6.388.810.348,00)</u>

Surplus/Defisit – LO tahun 2024 sebesar minus Rp. 6.185.453.104,00 dan tahun 2023 sebesar minus Rp. 6.388.810.348,00 adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Surplus/Defisit	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Jumlah Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah Beban	6.185.453.104,00	6.388.810.348,00	203.357.244,00
3	Surplus/Defisit dari Operasi	(6.185.453.104,00)	(6.388.810.348,00)	203.357.244,00
4	Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
5	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
6	Surplus/Defisit- LO	(6.185.453.104,00)	(6.388.810.348,00)	203.357.244,00

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 18.479.296.916,48 dan Rp. 18.631.753.560,48 dengan rincian sebagai berikut:

No	Ekuitas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Ekuitas Awal	18.631.753.560,48	18.044.365.930,48	587.387.630,00	3,26
2	Surplus/Defisit – LO	(6.185.453.104,00)	(6.388.810.348,00)	203.357.244,00	(3,18)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.519.055,00	568.369.292,00	(565.850.237,00)	(99,56)
4	Kewajiban Untuk DiKonsolidasikan	6.030.477.405,00	6.407.828.686,00	(377.351.281,00)	(5,89)
	Jumlah	18.479.296.916,48	18.631.753.560,48	(152.456.644,00)	(0,82)

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 152.456.644,00 atau sebesar minus 0,82%. Penurunan Ekuitas Akhir tersebut secara signifikan terdapat pada Koreksi Ekuitas sebesar minus Rp. 568.369.292,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

5.3.1. EKUITAS AWAL	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	18.631.753.560,48	18.044.365.930,48

Ekuitas Awal tahun 2024 dan 2023 masing-masing berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 yang merupakan Total Aset dikurangi Total Kewajiban dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Ekuitas Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Aset Lancar	1.058.500,00	639.500,00	639.500,00	65,52
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
3	Aset Tetap	18.479.581.514,48	18.044.095.430,48	508.591.739,00	6,08
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0
5	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
6	Kewajiban	2.832.848,00	369.000,00	2.463.848,00	667,71
	Jumlah	18.631.753.560,48	18.044.365.930,48	587.387.630,00	6,06

Jumlah ekuitas awal per 31 Desember 2024 dilihat dari sisi neraca mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 587.387.630,00 atau sebesar 6,06%. Kenaikan ekuitas awal tersebut secara

signifikan terdapat pada kenaikan aset tetap sebesar Rp. 2.463.848,00 dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar 667,71%

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	(6.185.453.104,00)	(6.388.810.348,00)

Surplus/(Defisit) - LO tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar minus Rp. 6.185.453.104,00 dan minus Rp. 6.388.810.348,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Surplus/Defisit LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Pendapatan - LO	0,00	0,00	0,00	0
2	Beban - LO	6.185.453.104,00	6.388.810.348,00	203.357.244,00	(3,18)
3	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	0,00	0,00	0,00	0
4	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah	(6.185.453.104,00)	(6.388.810.348,00)	203.357.244,00	(3,18)

Jumlah Surplus/(Defisit) - LO per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 203.357.244,00 atau sebesar minus 3,18%. kenaikan Surplus/(Defisit) – LO tersebut secara signifikan terdapat pada penurunan Beban-LO sebesar Rp. 203.357.244,00 dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar (3,18%)

Rincian Surplus/(Defisit) - LO tahun 2024 dan 2023 dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Operasional.

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	2.519.055,00	568.369.292,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ekuitas tahun 2024 dan 2023 merupakan koreksi ekuitas berupa penambahan masing-masing sebesar minus Rp. 2.519.055,00 dan Rp. 568.369.292,00

No	Koreksi Ekuitas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	568.369.292,00	(568.369.292,00)	(100)
2	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.519.055,00	0,00	2.519.055,00	100
	Jumlah	2.519.055,00	568.369.292,00	(565.850.237,00)	(99,56)

Jumlah koreksi ekuitas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp. 565.850.237,00 atau sebesar 99,56%.

a. Koreksi Ekuitas – Lainnya

Koreksi Ekuitas - Lainnya selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp. 0,00) dan Rp. 568.369.292,00 terdiri dari:

Koreksi Ekuitas Lainnya karena pada tahun 2024 sebesar (Rp. 0,00) disebabkan karena adanya koreksi nilai akumulasi aset rusak berat (aset lain-lain), mencatat penyesuaian penambahan dan penyelesaian dana transfer dari pemerintah pusat, koreksi atas investasi jangka panjang.

b. Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.519.055,00 dan Rp. 0,00 terdiri dari:

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut disebabkan adanya pencatatan aset baru atas perolehan sebelum tahun berjalan, adanya kapitalisasi aset tetap, penghapusan sebagian aset tetap. Koreksi nilai pencatatan atas aset tetap

5.3.4. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>6.030.477.405,00</u>	<u>6.407.828.686,00</u>

Kewajiban Untuk dikonsolidasikan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.030.477.405,00 dan Rp. 6.407.828.686,00.

5.3.5. EKUITAS AKHIR	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>18.479.296.916,48</u>	<u>18.631.753.560,48</u>

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1 18.479.296.916,48 dan Rp. 18.631.753.560,48. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Saldo Awal Ekuitas, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Komposisi Neraca Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Neraca	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
ASET	18.482.132.514,48	18.634.357.799,48	(152.225.285,00)	(0,82)
KEWAJIBAN	2.835.598,00	2.604.239,00	231.359,00	8,88
EKUITAS	18.479.296.916,48	18.631.753.560,48	(152.456.644,00)	(0,82)

Berikut penjelasan dari masing-masing kelompok dari tabel diatas sebagai berikut:

5.4.1. ASET	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>18.482.132.514,48</u>	<u>18.634.357.799,48</u>

Aset Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 18.482.132.514,48 dan Rp. 18.634.357.799,48

Jenis Aset	31/12/2024 (Rp)	31/12/2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
Aset Lancar	2.551.000,00	1.058.500,00	1.492.500,00	141,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
Aset Tetap	18.479.581.514,48	18.633.299.299,48	(153.717.785,00)	(0,82)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah	18.482.132.514,48	18.634.357.799,48	(152.225.285,00)	(0,82)

Penjelasan dari ke-lima Jenis Aset tersebut diatas adalah sebagai berikut:

5.4.1.1. ASET LANCAR	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.551.000,00</u>	<u>1.058.500,00</u>

Aset lancar terdiri dari kas, kas lainnya dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan termasuk persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 naik sebesar Rp. 1.492.500,00 atau 141% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023. Penjelasan dari unsur dalam kepemilikan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah :

1. Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	2.551.000,00	1.058.500,00

Merupakan nilai Persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri atas:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Alat Tulis Kantor	177.000,00	493.500,00	(316.500,00)	(64,13)
2	Kertas dan Cover	824.000,00	320.000,00	504.000,00	157,50
3	Benda Pos	1.550.000,00	200.000,00	1.350.000,00	675
4	Bahan Komputer	0,00	45.000,00	(45.000,00)	(100)
	Jumlah	2.551.000,00	1.058.500,00	1.492.500,00	141

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.492.500,00 atau 141%.

5.4.1.2 ASET TETAP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	18.479.581.514,48	18.633.299.299,48

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Tanah	13.983.610.000,00	13.983.610.000,00	0,00	0
2	Peralatan dan Mesin	1.750.602.530,00	1.611.456.530,00	139.146.000,00	8,63
3	Gedung dan Bangunan	4.957.188.493,48	4.957.188.493,48	0,00	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.888.533.000,00	2.526.793.000,00	361.740.000,00	14,32
5	Akumulasi Penyusutan	(5.100.352.509,00)	(4.445.748.724,00)	(654.603.785,00)	14,72
	Jumlah	18.479.581.514,48	18.633.299.299,48	-153.717.785,00	(0,82)

Penjelasan masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	13.983.610.000,00	13.983.610.000,00

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 13.983.610.000,00 dan Rp. 13.983.610.000,00. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	13.983.610.000,00	13.983.610.000,00	0,00	0
2	Penambahan :				
	Jumlah Penambahan	0,00	0,00	0,00	0
3	Pengurangan :				
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0
	Total Kenaikan Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0
4	Saldo Akhir 31 Desember	13.983.610.000,00	13.983.610.000,00	0,00	0

5.4.1.2.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.750.602.530,00	1.611.456.530,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.750.602.530,00 dan Rp. 1.611.456.530,00. Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 126.366.000,00 karena adanya penambahan sebesar Rp. 139.146.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	1.611.456.530,00	1.410.160.513,00	201.296.017,00	14,27
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	126.366.000,00	224.664.703,00	(98.298.703,00)	(43,750)
	b. Belanja/Jasa yang dikapitalisasi	0,00	3.251.188,00	(3.251.188,00)	(100)
	c. Reklasifikasi antar KIB:				
	- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Alat Kantor	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100
	- Reklasifikasi dari Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00	100
	Jumlah Penambahan	139.146.000,00	227.915.891,00	(88.769.891,00)	(38,95)
3	Pengurangan :				
	a. Belanja Modal tidak masuk Kategori Aset		26.061.203,00	(26.061.203,00)	(100)
	b. Reklasifikasi antar KIB	0,00	558.671,00	(558.671,00)	(100)
	- Reklasifikasi ke Ekstrakom	0,00	558.671,00	(558.671,00)	(100)
	Jumlah Pengurangan	0,00	26.619.874,00	(26.619.874,00)	(100)
	Total Kenaikan Tahun 2024	139.146.000,00	201.296.017,00	139.146.000,00	69,13
4	Saldo Akhir 31 Desember	1.750.602.530,00	1.611.456.530,00	139.146.000,00	8,63

Kenaikan aset peralatan dan mesin secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja

Modal sebesar Rp. 126.366.000,00 tahun 2024.

Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Kecamatan Gambut pada tahun 2024 sebesar Rp. 139.146.000,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 126.366.000,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp. 126.366.000,00
 - b. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya Barang/jasa yang dikapitalisasi senilai Rp. 12.780.000,00 terdiri dari:

No.	Nama Aset	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Alat Kantor Lainnya	5.100.000,00	Reklasifikasi Antar KIB Dari Beban Pemeliharaan Alat Kantor Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin
2	Alat Kantor Lainnya	7.680.000,00	Reklasifikasi Antar KIB Dari Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	Jumlah	12.780.000,00	

5.4.1.2.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	4.957.188.493,48	4.957.188.493,48

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 4.957.188.493,48 dan Rp. 4.957.188.493,48. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	4.957.188.493,48	4.207.405.960,48	749.782.533,00	17,82
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	0,00	70.155.000,00	(70.155.000,00)	(100)
	b. Mutasi dari SKPD lain	0,00	679.627.533,00	(679.627.533,00)	(100)
	c. Reklasifikasi antar KIB	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	– Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	(100)
	Jumlah Penambahan	0,00	749.782.533,00	(749.782.533,00)	(100)
3	Pengurangan :				

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0
	Total Kenaikan Tahun 2024	0,00	749.782.533,00	0,00	0
	Saldo Akhir 31 Desember	4.957.188.493,48	4.957.188.493,48	0,00	0

5.4.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	2.888.533.000,00	2.526.793.000,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.888.533.000,00 dan sebesar Rp. 2.526.793.000,00. Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 361.740.000,00 karena adanya penambahan sebesar Rp. 380.680.000,00 dan pengurangan sebesar Rp. 18.940.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	2.526.793.000,00	2.179.888.000,00	346.905.000,00	15,91
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	380.680.000,00	346.905.000,00	33.775.000,00	9,74
	b. Mutasi dari SKPD lain	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah Penambahan	380.680.000,00	346.905.000,00	33.775.000,00	9,74
3	Pengurangan :				
	a. Reklasifikasi antar KIB	18.940.000,00	0,00	18.940.000,00	100
	– Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	18.940.000,00	0,00	18.940.000,00	100
	Jumlah Pengurangan	18.940.000,00	0,00	18.940.000,00	0
	Total Kenaikan Tahun 2024	361.740.000,00	346.905.000,00	361.740.000,00	104,28
	Saldo Akhir 31 Desember	2.888.533.000,00	2.526.793.000,00	361.740.000,00	14,32

Kenaikan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar Rp. 380.680.000,00.

Kenaikan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp. 380.680.000,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 380.680.000,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp. 380.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Aset	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Jalan Lainnya	200.000.000,00	Peningkatan dan Pengecoran Jalan Gang Karya RT.10 Kelurahan Gambut
2	Jembatan pada Jalan Desa	115.180.000,00	Pembangunan Rehabilitasi Titian Gang Swarga RT. 010 RW. 03 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gang At-Thaibah RT. 09 RW. 03 Kelurahan Gambut Barat Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Tatah Hanyar RT. 07 RW. 03 Kelurahan Gambut Barat
3	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	65.500.000,00	Pembangunan Siring Jalan Bumi Putera RT. 008 RW. 03 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar
	Jumlah	380.680.000,00	

2. Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Kecamatan Gambut Tahun 2024 sebesar Rp. 18.940.000,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp. 18.940.000,00

5.4.1.2.5 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>(5.100.352.509,00)</u>	<u>(4.445.748.724,00)</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp. 5.100.352.509,00) dan (Rp. 4.445.748.724,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.361.140.235,00)	(1.219.927.589,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.704.540.183,00)	(2.440.497.309,00)

3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.034.672.091,00)	(785.323.826,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan		(5.100.352.509,00)	(4.445.748.724,00)

Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar melakukan perhitungan penyusutan atas aset tetap dengan metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Penyusutan dilaksanakan terhadap aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sedangkan aset Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya selain buku perpustakaan, barang bersifat kebudayaan, hewan, ternak dan tanaman tidak disusutkan.

5.4.1.3 ASET LAINNYA

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang terdiri dari Saldo Netto 1) Aset Tak Berwujud yang telah diperhitungkan amortisasinya dan 2) Aset Lain-Lain :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)	0,00
	Aset Tak Berwujud Neto	0,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-Lain	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(7.650.000,00)	(7.650.000,00)	0,00
	Aset Lain-Lain Neto	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lainnya Neto	0,00	0,00	0,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00, merupakan saldo neto atas Aset Lainnya tahun 2024 dan 2023 yang telah diperhitungkan dengan mengurangi nilainya karena penyisihan, amortisasi dan penyusutan komponen akun aset lainnya. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1. Aset Tak Berwujud	2.500.000,00	2.500.000,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00,00 dan Rp. 2.500.000,00, Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	Penambahan :				
	Jumlah Penambahan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengurangan :				
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kenaikan Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

1a. Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)

Saldo akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp. 2.500.000,00) dan (Rp. 2.500.000,00). Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan kontra akun Aset Tak Berwujud yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis ATB	Akun	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1		Software	2.500.000,00	2.500.000,00
		Amortisasi	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	0,00	0,00
Total Aset Tidak Berwujud			2.500.000,00	2.500.000,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud			(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
Total Aset Tidak Berwujud Neto			0,00	0,00

2. Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	7.650.000,00	7.650.000,00

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 7.650.000,00 dan Rp. 7.650.000,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
2	Penambahan :				
	Jumlah Penambahan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengurangan :				
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kenaikan Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00

2a. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(7.650.000,00)	(7.650.000,00)

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar minus Rp. 7.650.000,00 dan minus Rp. 7.650.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan reklasifikasi dari akumulasi aset tetap sehubungan adanya aset tetap yang akan dihapuskan.

Atas aset-aset yang telah diusulkan untuk dihapuskan tersebut, belum ditindak lanjuti dengan proses penghapusan karena masih adanya validasi atas aset-aset yang akan dihapuskan.

5.4.2. KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	2.835.598,00	2.604.239,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.2.835.598,00 dan Rp. 2.604.239,00 adalah saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	2.835.598,00	2.604.239,00

Mutasi Kewajiban Jangka Pendek selama Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31/12/2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31/12/2024 (Rp)
1	Utang Belanja	2.604.239,00	2.835.598,00	(2.604.239,00)	2.835.598,00
	JUMLAH	2.604.239,00	2.835.598,00	(2.604.239,00)	2.835.598,00

Penjelasan mutasi atas masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	2.835.598,00	2.604.239,00

Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.2.835.598,00 dan Rp. 2.604.239,00 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Mutasi Utang Belanja sebagai berikut:

No	Uraian	31/12/2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31/12/2024 (Rp)
1	Utang Belanja	2.604.239,00	2.835.598,00	(2.604.239,00)	2.835.598,00
	Jumlah	2.604.239,00	2.835.598,00	(2.604.239,00)	2.835.598,00

1. Utang Belanja meliputi Belanja Listrik, PDAM dan Internet untuk pembayaran pemakaian bulan Desember 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 di lingkup SKPD Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar senilai Rp.2.835.598,00.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/Turun (%)
Tagihan Listrik	987.788,00	1.299.439,00	(23,98)
Tagihan Air	1.001.985,00	378.500,00	164,73
Tagihan Internet	845.825,00	926.300,00	(8,69)
Jumlah	2.835.598,00	2.604.239,00	8,88

5.4.3. EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	18.479.296.916,48	18.631.753.560,48

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 18.479.296.916,48 dan Rp. 18.631.753.560,48 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun
Ekuitas Awal	18.631.753.560,48	18.044.365.930,48	587.387.630,00
Surplus/Defisit-LO	(6.185.453.104,00)	(6.388.810.348,00)	203.357.244,00
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Koreksi Ekuitas	2.519.055,00	568.369.292,00	(565.850.237,00)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	6.030.477.405,00	6.407.828.686,00	(377.351.281,00)
Ekuitas Per 31 Desember	18.479.296.916,48	18.631.753.560,48	(152.456.644,00)

5.4.4. KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	18.634.586.408,48	18.634.357.799,48

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.634.586.408,48 dan Rp. 18.634.357.799,48 Jumlah kewajiban dan ekuitas dana adalah merupakan jumlah kewajiban ditambah jumlah ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Jumlah Kewajiban	2.835.598,00	2.604.239,00
2	Jumlah Ekuitas	18.479.296.916,48	18.631.753.560,48
	Jumlah kewajiban dan ekuitas	18.482.132.514,48	18.634.357.799,48

**BAB
VI****PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN**

Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebagai entitas akuntansi terdiri atas unit unit kerja yang digabungkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Informasi non keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berupa profil sebagai berikut:

6.1. Dasar Hukum Pendirian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banjar

Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6). Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang merupakan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan

6.2. Organisasi Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Berdasarkan peraturan dan dasar hukum yang dijelaskan tersebut diatas, Pemerintah Kecamatan Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

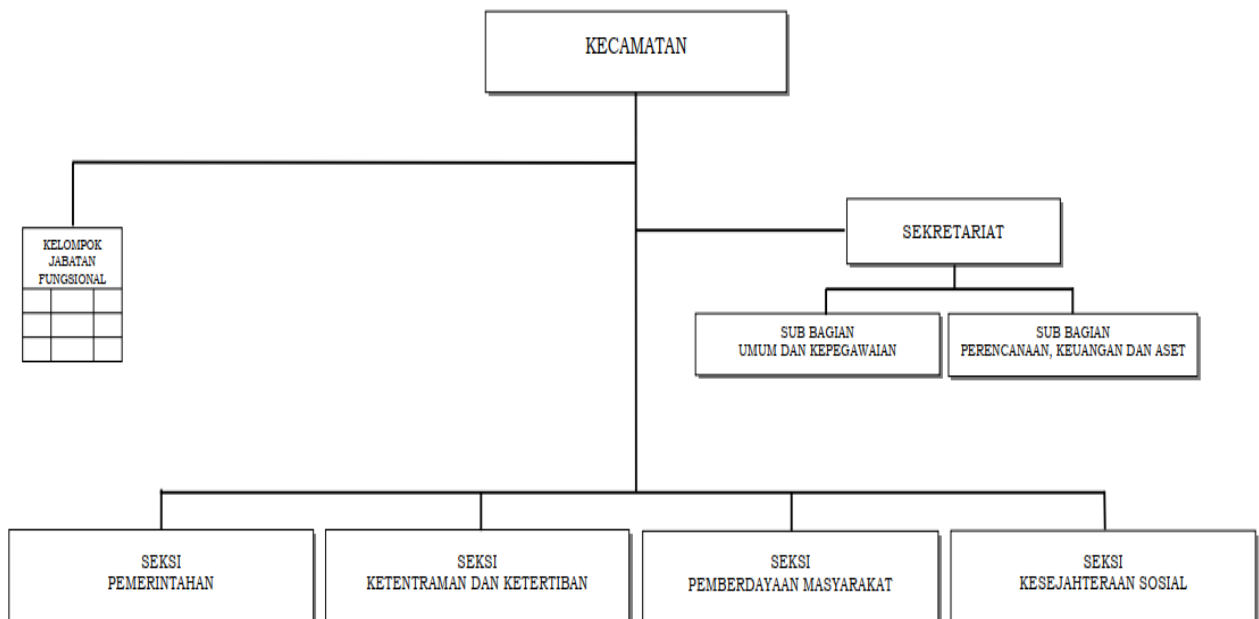
- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan

Dengan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar 6.1. berikut:

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



Gambar 6.1. Bagan SOTK Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2021

6.3. Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Camat

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- b. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan

- instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokol;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- h. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- k. Membuat Daftar Urut Kependidikan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
- l. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai,

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Aset

- a. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
- f. Menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
- j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
- l. Menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;

- n. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
- d. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
- g. Melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- h. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;

- k. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
- j. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
- e. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
- f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
 1. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
 3. Perpustakaan desa;
 4. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 6. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
 7. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 8. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 9. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
 10. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 11. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
 12. Penataan ruang kawasan terpadu;
 13. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian

- lingkungan;
14. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 15. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
- h. Mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
 - i. Fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
 - j. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - l. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial masyarakat;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data (penyandang masalah sosial);
- f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi (penyandang masalah sosial)
- i. Melaksanakan fasilitasi kelancaran pemberian/penyaluran dan sumbangan sosial lainnya kepada (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan korban bencana alam;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi dan pemeliharaan

makam pahlawan/makam perintis kemerdekaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

- k. Membuat laporan tentang kejadian bencana alam untuk disampaikan ke instansi terkait;
- l. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang terkait dengan keagamaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melaksanakan komunikasi dan konsultasi serta menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembinaan kegiatan keagamaan;
- n. Melaksanakan pelayanan pembuatan surat pengantar nikah;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.4. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam mendukung tercapainya target kinerja. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun secara kualitas untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas maka diperlukan lagi sumber daya manusia khususnya perencana yang berkualitas dan handal. Profil Sumber Daya Manusia Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini :

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Camat			1		1				1						3
2	Sekretaris			1			1			1						3

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
	Kecamatan															
3	Kepala Seksi Pemerintahan				-		-				-					-
4	Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban				1		1				1					3
5	Kepala Seksi Kejahteraan Sosial				1		1				1					3
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				1	1				1						3
7	Subbag Umum & Kepegawaian				1		1			1						3
8	Subbag Perencanaan, Keuangan & Aset				1		1				1					3
9	Lurah				2		2			1	1					5
10	Sekretaris Kelurahan				2		2				1		1			6
11	Kepala Seksi Pemerintahan (Kelurahan)				2		2				2					6
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan)				2		2				1	1				6
13	Kepala Seksi Kejahteraan Sosial (Kelurahan)				2		2				2					6
14	Pelaksana						6	4					10			20
15	Fungsional						1				1					2
	Jumlah	0	0	2	15	2	22	4	0	4	18	1	15	0	0	

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kecamatan Gambut berstatus PNS dan CPNS sebanyak orang dengan rincian sesuai golongan sebagai berikut:

GOLONGAN	JUMLAH
I	- orang
II	4 orang
III	22 orang
IV	2 orang
Jumlah	28 orang

6.5. Sarana Dan Prasarana Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Sarana dan prasarana adalah salah satu hal yang sangat diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 6.2
KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA KERJA
KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR SAMPAI DENGAN
TAHUN 2024

No	Nama Barang	Kondisi Barang			JUMLAH
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Mini Bus	1			1
2	Sepeda Motor	19	14	1	34
3	Scooter	3			2
4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0		1
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16		4	20
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	11		26
7	Meja ½ Biro		4		4
8	Meja Komputer	1	1		2
9	Meja Kerja Kayu		3		3
10	Meja Resepsionis	1	1		2
11	Meja Tamu	1	2		3
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17			6
13	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	6	7	33
14	Kursi Rapat	8	50	18	76
15	Kursi Putar	4	4		8
16	Kursi Tamu	2	3		5
17	Kursi Biasa	20	4		24
18	Kursi Lipat	30			30
19	Kursi Besi/Metal		2		2
20	Kursi Kayu		1		1
21	Sofa	6	1		7
22	Bangku Panjang Besi/Metal	2			2
23	Bangku Tunggu	2			2

No	Nama Barang	Kondisi Barang			JUMLAH
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
24	Lemari Besi/Metal	6		3	9
25	Lemari Kayu	3	1	1	5
26	Lemari Display	1			1
27	Lemari Sorok	2			2
28	Lemari Kaca	6			6
29	Lemari Es	3	1		4
30	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1			1
31	Filing Cabinet	12	1		13
32	P.C. Unit	27	3		30
33	Laptop	13	1		14
34	Note Book	1			1
35	Monitor	1			1
36	Printer	32	7	1	40
37	Mesin Fotocopy Folio	2			2
38	Mesin Ketik Listrik		1		1
39	Mesin Ketik Manual	1	2	1	4
40	Mesin Laminating		1		1
41	Meubeleur Lainnya		4		4
42	Portable Generating Set	1	1		2
43	Router	1			1
44	Acces Point	3			3
45	Switch	7			7
46	CCTV-Camera Control Television System	4			4
47	AC Split	19	4		23
48	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1			1
49	Kipas Angin	10	7		17
50	Alat Pemadam/Portable	1			1
51	Portable Water Pump		1		1
52	Unit Power Supply	2	1	1	4
53	Televisi	4	4		8
54	Unit Tranceiver Ssb Portable		1		1
55	Telephone Mobile	1			1
56	LCD Projektor	2			2
57	Layar Film/Projector	1	1		2
58	Camera Conference	1			1
59	Camera Video	3		1	4
60	Papan Visual/Papan Nama	3			
61	Papan Pengumuman	12		1	13
62	Mesin Absensi	1			1
63	Alat Kantor Lainnya	2		6	8
64	Amplifier	1			1
65	Loudspeaker	12			12
66	Sound System	3			3
67	Wireless	1	1		1
68	Wireless Mic	3			3

No	Nama Barang	Kondisi Barang			JUMLAH
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
69	Peralatan Studio Audio Lainnya	3			3
70	Dispenser	4	1		5
71	Tempat Tidur Besi		3		3
72	Karpet	1	2		3
73	Gordyin/Kray	4	4		8
74	Rak Kayu			1	1
75	Jam Mekanis		2		2
76	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	1	5	9
77	Alat Kesehatan Umum lainnya	3			3
78	Kompor Minyak		1		1
79	Kompor Gas		1		1
80	Tabung Gas		1		1
81	Rice Warmer		2		2
82	Alat Dapur lainnya		5		5

Sumber data : Data BMD Kecamatan Gambut, Per 31 Desember 2024

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kab. Banjar berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, peralatan dan perlengkapan kerja.

**BAB
VII****PENUTUP**

Dari gambaran laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 “Unaudited” Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebagaimana diungkapkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan SKPD ditutup dengan jumlah aset serta kewajiban & ekuitas per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar : Jumlah aset Rp. 18.482.132.514,48; Jumlah kewajiban Rp. 2.835.598,00; Jumlah Ekuitas Rp. 18.479.296.916,48.
2. Realisasi pendapatan operasional tahun 2024 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp. 0,00.
3. Realisasi beban tahun 2024 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp. 6.185.453.104,00.
4. Realisasi pendapatan tahun 2024 menurut Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) sebesar Rp. 0,00 dari anggarannya sebesar Rp. 0,00.
5. Realisasi belanja operasi tahun 2024 dalam Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) sebesar Rp. 5.523.431.405,00 atau mencapai 90,17% dari anggarannya sebesar Rp. 6.125.248.934,00.
6. Realisasi belanja modal tahun 2024 dalam Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) sebesar Rp. 507.046.000,00 atau tercapai 99,10% dari anggarannya sebesar Rp. 511.642.000,00.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

Martapura, 31 Januari 2025

CAMAT GAMBUT,

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
NIP. 19801125 200012 1 003